

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8

1.6	Sumber Bahan Hukum	9
BAB II INSTRUMEN HUKUM ATAS IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI SEBAGAI KAWASAN PEMANFAATAN PANAS BUMI..... 12		
2.1	Sumber Hukum Pemanfaatan Panas Bumi.....	12
2.2	Pengertian Penmanfaatan Panas Bumi	17
2.3	Kewenangan Pemanfaatan Panas Bumi	19
2.4	Pemanfaatan Panas Bumi	26
2.5	Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi.....	30
2.6	Penggunaan Lahan dalam Pemanfaatan Panas Bumi.....	41
BAB III PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN HUTAN KONSERVASI ATAS PEMANFAATAN PANAS BUMI 46		
3.1	Pengertian Kawasan Hutan.....	46
3.2	Perlindungan Kawasan Hutan	48
3.3	Pelestarian Kawasan konservasi.....	53
3.4	Penggolongan Kawasan Hutan di Indonesia	57
3.5	Penggunaan Hutan Konservasi diluar Kegiatan Kehutanan Lainnya.....	70
3.6	Pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan.....	74
BAB IV PENUTUP 78		
4.1	Kesimpulan.....	78

4.2	Saran.....	78
DAFTAR BACAAN.....		80

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- c) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- f) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- g) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
- h) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
- i) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- k) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Pengusahaan Panas Bumi

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk pemanfaatan secara Tidak Langsung

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran potensi panas bumi	3
Tabel 2 Sebaran hutan di Jawa Timur	13
Tabel 3 Kewenangan pemanfaatan Panas Bumi	19
Tabel 4 Pemberian izin pengusahaan panas bumi	32
Tabel 5 Kewajiban pemegang izin pemanfaatan panas bumi secara langsung	36

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur pengusahaan panas bumi secara tidak langsung.....	29
Bagan 2 Alur perizinan panas bumi	34
Bagan 3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta potensi panas bumi di Jawa Timur15